



## Komunikasi partisipatif masyarakat Suku Akit kepada pemerintah dalam pengelolaan hutan mangrove di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

Wendi Harla Putra<sup>1✉</sup>,

Universitas Riau, Pekanbaru<sup>(1)</sup>

DOI: 10.31004/jutin.v7i4.36643

✉ Corresponding author:

[wendiharlapura@gmail.com]

### Article Info

### Abstrak

#### Kata kunci:

*Komunikasi partisipatif;  
Pengelolaan hutan  
mangrove;  
Masyarakat suku Akit;*

Penelitian ini mengkaji komunikasi partisipatif antara pemerintah desa dan masyarakat Suku Akit dalam pengelolaan hutan mangrove di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Fokus penelitian ini adalah peran dialog, pemberdayaan suara, dan pendidikan pembebasan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan studi sebelumnya, partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam penting bagi keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan dialog, penyampaian suara, dan pendidikan pembebasan oleh masyarakat Suku Akit dalam menjaga hutan mangrove. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses dialog cukup efektif meski terdapat hambatan komunikasi. Komunitas adat juga memanfaatkan media untuk informasi dan kegiatan komunitas, dan metode pendidikan pembebasan berperan penting dalam memberdayakan masyarakat Suku Akit.

### Abstract

#### Keywords:

*Participatory  
communication;  
mangrove forest  
management;  
Akit tribe community;*

This study examines the participatory communication between the village government and the Akit Tribe community in managing mangrove forests in Bantan District, Bengkalis Regency. The research focuses on the role of dialogue, voice empowerment, and emancipatory education in encouraging community participation. Prior research emphasizes that active community involvement in natural resource management is crucial for environmental sustainability. This study aims to analyze how dialogue, voice empowerment, and emancipatory education are applied by the Akit Tribe in managing mangrove forests. A qualitative approach with a case study design was used, collecting data through

observation and in-depth interviews. The findings show that the dialogue process has been effective, though communication barriers persist. The indigenous community also utilizes media for information sharing and community activities, while emancipatory education plays a key role in empowering the Akit Tribe in managing mangrove forests.

---

## 1. PENDAHULUAN

Pulau Bengkalis, yang berbatasan langsung dengan Selat Melaka, memiliki ekosistem mangrove yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir serta menjadi sumber daya alam yang bernilai ekonomi bagi masyarakat, khususnya Suku Akit. Suku ini telah lama memanfaatkan kayu mangrove, baik untuk bahan bakar, material bangunan, maupun produksi arang. Namun, praktik pemanfaatan yang berlangsung secara terus-menerus tanpa pengelolaan yang berkelanjutan telah mengakibatkan degradasi signifikan pada ekosistem mangrove, bahkan menurunkan luas hutan mangrove di Pulau Bengkalis secara drastis.

Penelitian yang dilakukan Fikri (2006) menunjukkan bahwa luas hutan mangrove di Pulau Bengkalis berkurang sekitar 2.012 hektar antara tahun 1992 hingga 2002, dari total 8.182 hektar pada 1992 menjadi hanya 6.115 hektar pada tahun 2002. Perubahan luas hutan ini terutama disebabkan oleh perubahan tata guna lahan untuk berbagai aktivitas ekonomi yang didorong oleh kebutuhan masyarakat. Misalnya, kayu mangrove digunakan sebagai bahan baku arang dan material bangunan di daerah pesisir.

Di Kecamatan Bantan, khususnya di Desa Kembang Baru dan Desa Pambang, kayu mangrove telah menjadi sumber ekonomi utama bagi masyarakat Akit. Terdapat 26 dapur arang yang beroperasi di desa ini, terdiri dari 15 dapur besar dan 11 dapur kecil, yang setiap tahunnya menghasilkan nilai ekonomi panglong arang sekitar Rp 447.500.000. Proses produksi arang melibatkan masyarakat mulai dari penebangan kayu hingga pengolahan arang dan distribusinya ke konsumen lokal maupun luar negeri, seperti Jepang dan Taiwan. Permintaan arang yang terus meningkat menyebabkan pemanfaatan hutan mangrove menjadi semakin besar.

Namun, aktivitas masyarakat yang tidak terlepas dari eksploitasi hutan mangrove ini telah menyebabkan dampak buruk terhadap ekosistem pesisir, seperti berkurangnya fungsi ekologi mangrove dalam menahan abrasi dan mengurangi polusi. Mangrove yang tersisa di Kecamatan Bantan hanya sekitar 949 hektar, sementara populasi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sumber daya ini terus meningkat. Berdasarkan data kependudukan, Desa Kembang Baru dan Desa Pambang memiliki 996 jiwa yang mayoritas, yaitu sekitar 60% masyarakatnya, adalah penebang kayu mangrove. Sementara sisanya bekerja sebagai nelayan, pengusaha arang, petani, dan pedagang kecil.

Selain menghasilkan arang, masyarakat Suku Akit juga memanfaatkan kayu mangrove sebagai kayu cerocok untuk pondasi bangunan serta kayu bakar untuk kebutuhan rumah tangga dan industri lokal, seperti pedagang gorengan dan warung makan yang mengandalkan api tungku. Kayu cerocok umumnya dijual kepada pengusaha yang akan menggunakannya di daerah dengan tanah labil, seperti di Bengkalis. Aktivitas ekonomi ini melibatkan berbagai kelompok dalam masyarakat, dari penebang kayu, pengolah arang, hingga para pengecer yang menjual hasil produksi ke konsumen.

Melihat fenomena ini, jelas terlihat adanya ketergantungan masyarakat pada sumber daya alam hutan mangrove, yang lama-kelamaan akan mengancam kelestariannya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pengelolaan hutan yang berkelanjutan melalui komunikasi partisipatif antara pemerintah dan masyarakat setempat. Komunikasi partisipatif dianggap sebagai salah satu strategi yang efektif dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konservasi dan keberlanjutan hutan mangrove. Menurut Muchtar (2016), komunikasi partisipatif adalah komunikasi dua arah yang memfasilitasi dialog antara pihak pemerintah dan masyarakat, sehingga mereka dapat terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan dan merumuskan solusi bersama untuk mencapai keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Pentingnya komunikasi partisipatif juga ditunjukkan dalam berbagai penelitian sebelumnya. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Siahaya et al. (2016) di Kalimantan Utara menunjukkan bahwa masyarakat lokal menggunakan pengetahuan ekologi tradisional dan mendirikan institusi komunitas untuk melestarikan hutan mangrove mereka. Peran pemerintah dan perusahaan lokal sebagai pendukung upaya-upaya konservasi juga dianggap sangat penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Penelitian lain oleh Tanjung et al. (2017) di Sumatera Barat mengungkapkan bahwa pengelolaan hutan Nagari secara berkelanjutan berhasil dicapai melalui partisipasi aktif anggota masyarakat dalam semua tahapan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Ini

menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sangat diperlukan agar keberlanjutan pengelolaan hutan dapat terjaga.

Meskipun demikian, penerapan komunikasi partisipatif di Kecamatan Bantan masih menghadapi berbagai tantangan. Sering kali, masyarakat Suku Akit merasa enggan atau bahkan tidak hadir dalam rapat atau pertemuan yang diadakan pemerintah desa. Selain itu, pemerintah desa sendiri terkadang kurang memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi aktif masyarakat. Situasi ini menggambarkan bahwa komunikasi dua arah belum berjalan optimal dan lebih banyak berlangsung satu arah, di mana pemerintah cenderung mendominasi proses komunikasi tanpa adanya masukan signifikan dari masyarakat. Dalam perspektif Muchtar (2016), hal ini tidak memenuhi kriteria komunikasi partisipatif yang ideal, yang seharusnya memberikan ruang bagi dialog terbuka dan diskusi yang produktif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana komunikasi partisipatif dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dalam pengelolaan hutan mangrove di Kecamatan Bantan. Fokus penelitian akan mencakup analisis terhadap empat aspek utama: dialog antara masyarakat dan pemerintah, suara atau aspirasi yang disampaikan masyarakat, penerapan pedagogi pembebasan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, serta refleksi tindakan sebagai upaya mengatasi permasalahan terkait pengelolaan hutan mangrove.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah setempat dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif dan partisipatif, terutama dalam pelaksanaan program pengelolaan hutan mangrove yang melibatkan masyarakat. Dari segi akademis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti lain untuk lebih mendalami konsep komunikasi partisipatif, khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan konservasi lingkungan di masyarakat pesisir. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur komunikasi pembangunan di Indonesia, khususnya yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat adat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan mereka.

Dalam kajian ini, metode komunikasi partisipatif yang efektif sangat penting untuk menjembatani perbedaan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dengan upaya pelestarian lingkungan. Pendekatan bottom-up yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa perlu diterapkan, dengan didukung oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti LPM dan PKK. Melalui partisipasi aktif masyarakat, diharapkan program pengelolaan mangrove dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan penelitian terdahulu, penerapan pengetahuan ekologi tradisional dalam pengelolaan hutan, seperti yang diterapkan pada komunitas lokal di Tarakan, menunjukkan hasil yang positif dalam pelestarian ekosistem hutan mangrove.

Sebagai langkah akhir, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi komunikasi partisipatif di Kecamatan Bantan dan menyusun rekomendasi yang relevan bagi pemerintah dan masyarakat dalam mencapai keberlanjutan pengelolaan hutan mangrove. Dengan melibatkan semua pihak dalam dialog terbuka dan kerja sama yang produktif, pengelolaan hutan mangrove dapat dilakukan secara bijaksana sehingga mendukung kelangsungan ekonomi sekaligus menjaga ekosistem mangrove di Pulau Bengkalis untuk generasi yang akan datang.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah konsep yang penting untuk menciptakan proses yang inklusif dan berkelanjutan. Hakim (2017) mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat dalam berbagai tahap, mulai dari perencanaan hingga evaluasi hasil proyek. Hal ini sejalan dengan pandangan Sumaryadi et al. (2010) yang menekankan bahwa partisipasi mencakup kontribusi individu atau kelompok dalam bentuk masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dan materi. Istilah "partisipasi" sendiri berasal dari bahasa Inggris "*participation*," yang mengindikasikan pengambilan bagian atau pengikutsertaan.

Lebih jauh, Djalal & Supriadi (2001) mengungkapkan bahwa partisipasi melibatkan saran dan pendapat dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta kontribusi dalam bentuk barang, keterampilan, dan jasa. Aswasulikin (2017) menyatakan bahwa partisipasi juga merupakan wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui desentralisasi, yang menekankan perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*). Proses ini melibatkan masyarakat secara langsung dalam merencanakan dan membangun lingkungan mereka.

Muda & Batubara (2021) membagi partisipasi menjadi beberapa tahapan yang mencakup pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi, dan menikmati hasil. Pada tahap pengambilan keputusan, masyarakat diharapkan ikut serta dalam rapat untuk membahas perencanaan dan pelaksanaan program. Tahap pelaksanaan merupakan inti dari pembangunan, di mana partisipasi dapat dilihat dalam bentuk sumbangan pemikiran, materi, dan tindakan nyata sebagai anggota proyek. Selanjutnya, tahap evaluasi berfungsi sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan proyek di masa mendatang. Akhirnya, tahap menikmati hasil menjadi indikator

keberhasilan partisipasi masyarakat, di mana semakin besar manfaat yang dirasakan, semakin sukses proyek tersebut dalam memenuhi sasaran (Rosyida & Nasdian, 2011).

Wicaksono (2010) memperkenalkan gagasan bahwa partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat. Ia menyatakan bahwa partisipasi masyarakat memiliki gradasi kekuasaan yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan. Dalam pandangannya, partisipasi mencerminkan distribusi kekuasaan yang adil antara penyedia kegiatan dan kelompok penerima. Arnstein juga mengembangkan tangga partisipasi masyarakat yang terdiri dari beberapa tingkat (Arnstein, 1969). Pada tingkat dasar, terdapat manipulasi dan terapi, di mana masyarakat tidak dilibatkan dalam keputusan. Pada tingkat *tokenism*, masyarakat diberi informasi dan konsultasi, tetapi tidak semua saran mereka diakomodasi. Akhirnya, pada tingkat kekuatan masyarakat, terdapat kemitraan, pendelegasian kekuasaan, dan kontrol warga, di mana masyarakat memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja.

Partisipasi yang ideal, terjadi ketika masyarakat dapat mengontrol penuh proses pembangunan (Arnstein, 1969). Dengan demikian, keterlibatan aktif masyarakat bukan hanya memberikan legitimasi pada proyek, tetapi juga meningkatkan kualitas keputusan yang diambil. Dalam konteks ini, partisipasi bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah proses yang memerlukan komitmen dan keberanian untuk melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kesuksesan suatu proyek pembangunan sangat bergantung pada seberapa besar masyarakat dapat berpartisipasi dan merasakan dampak dari hasil pembangunan tersebut. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang teori partisipasi menjadi kunci untuk merancang dan melaksanakan program yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Komunikasi dapat dipahami sebagai proses pertukaran pesan yang bersifat interaktif dan ditandai oleh umpan balik (Yasir et al., 2020). Dalam konteks komunikasi partisipatif, proses ini melibatkan dialog dua arah, di mana para pihak terlibat menciptakan pemahaman bersama terhadap pesan yang disampaikan. Istilah "komunikasi partisipatif" pertama kali muncul dalam seminar di Amerika Latin pada tahun 1978, yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam komunikasi.

Ada lima konsep utama dalam komunikasi partisipatif: dialog, kesadaran, praktis, perubahan, dan kesadaran kritis (McPhail, 2009). Dialog merupakan landasan utama, di mana komunikasi dilakukan secara terbuka dan bebas, memungkinkan peserta untuk mendengarkan dan berbagi pengalaman. Suara menjadi pusat dari komunikasi ini, mengedepankan penyampaian aspirasi masyarakat, terutama yang terpinggirkan. Pedagogi pembebasan juga berperan penting, di mana komunikasi dilakukan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dengan dasar cinta, kerendahan hati, kepercayaan, dan harapan (Freire & Macedo, 2005).

Prinsip *Action-Reflection-Action* menggambarkan kegiatan reflektif yang melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah bersama. Keseluruhan prinsip ini saling mendukung untuk memastikan bahwa komunikasi partisipatif berjalan efektif dalam suatu program pembangunan.

Dalam konteks pengelolaan lingkungan, komunikasi partisipatif sangat relevan. Pendekatan ini melibatkan masyarakat dalam dialog dengan pemerintah, memastikan pengetahuan lokal dihargai dan diintegrasikan dalam strategi pengelolaan. Dengan dialog aktif yang inklusif, berbagai perspektif masyarakat dapat digali untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui proses ini meningkatkan motivasi dan komitmen mereka untuk melestarikan lingkungan, menciptakan rasa memiliki terhadap proyek-proyek lingkungan yang dijalankan.

Masyarakat suku Akit di Kabupaten Bengkalis, seperti diungkapkan oleh Saam & Nurhidayah (2019), adalah komunitas suku asli yang dikenal sebagai petani dan pengumpul kayu bakau (*mangrove*). Mereka memanfaatkan kayu bakau untuk membuat pancang bangunan yang disebut cerocok dan juga untuk produksi arang. Mata pencaharian utama mereka adalah pengrajin kayu bakau untuk pembuatan arah (*panglong*). Masyarakat suku Akit sering disebut sebagai masyarakat suku asli Melayu yang hidup di kawasan pesisir Riau dan Kepulauan Riau. Sebagian besar dari mereka tinggal di atas rumah rakit dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, termasuk pantai, laut, dan muara sungai (Rosaliza, 2017).

Analisis terhadap masyarakat suku Akit menunjukkan adanya dua jenis kapital sosial: *bounding social capital* di dalam komunitas dan *bridging social capital* di luar komunitas (Lawang, 2004). Hubungan antara masyarakat suku Akit dengan Tauke dan pemilik panglong bersifat dua dimensi—relasi vertikal yang mengarah pada patron-klien dan hubungan horizontal yang saling menguntungkan berdasarkan kesamaan latar belakang etnis dan sosial.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggali makna di balik fenomena yang diteliti, dengan menekankan pemahaman yang mendalam melalui interpretasi data yang diperoleh langsung dari lapangan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik komunikasi yang menekankan kesamaan makna antara komunikator dan komunikan (Kriyantono, 2014; Yin, 2018). Dalam desain penelitian kualitatif, ada beberapa pola yang digunakan, yakni deskriptif, verifikatif, evaluatif, serta *grounded theory*, yang membantu peneliti menguraikan data secara rinci dan sistematis sesuai konteksnya (Moleong, 2010).

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2012). Wawancara dilakukan dengan metode semi-terstruktur, di mana peneliti mengikuti panduan umum tetapi memberikan kebebasan kepada informan untuk menjelaskan lebih lanjut. Observasi dilakukan secara non-partisipan, dengan peneliti mengamati kegiatan masyarakat suku Akit, khususnya dalam pengelolaan hutan mangrove. Dokumentasi meliputi pengumpulan foto, arsip, dan data visual lain yang relevan dengan penelitian, sehingga informasi yang diperoleh lebih kaya dan mendalam.

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode yang diadaptasi dari Miles et al. (2014), yang meliputi empat tahapan: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan ini memastikan analisis yang sistematis, mulai dari reduksi data untuk merangkum informasi utama, hingga penyajian data dalam bentuk visual atau naratif untuk memperjelas pola. Langkah akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, di mana peneliti mengonfirmasi temuan dengan referensi silang agar hasil penelitian memiliki keabsahan dan dapat dipertanggungjawabkan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada dinamika komunikasi partisipatif antara pemerintah desa dan masyarakat Suku Akit dalam pengelolaan hutan mangrove di Desa Jangkang, Bantan Tengah, dan Pambang Baru. Komunikasi partisipatif dalam konteks ini merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat untuk merealisasikan tujuan pembangunan bersama. Menurut Kustiawan et al. (2023), komunikasi partisipatif adalah proses yang memungkinkan masyarakat mengungkapkan kebutuhan mereka secara transparan sehingga pemerintah dapat membentuk program yang relevan. Ini menjadi dasar penting bagi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, di mana masyarakat tidak hanya terlibat, tetapi turut merasa memiliki tanggung jawab atas kebijakan yang diterapkan.

Dalam konteks studi sebelumnya, seperti penelitian di Tarakan dan Sumatera Barat, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove terbukti meningkatkan pemahaman lokal dan mengurangi konflik antara pemerintah dan komunitas. Di Tarakan, misalnya, partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan memberikan dampak positif terhadap konservasi hutan, menumbuhkan pemahaman ekologis, dan mengurangi ketegangan dengan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif bukan hanya strategi komunikasi, tetapi juga solusi dalam menjawab kebutuhan lingkungan yang kompleks.

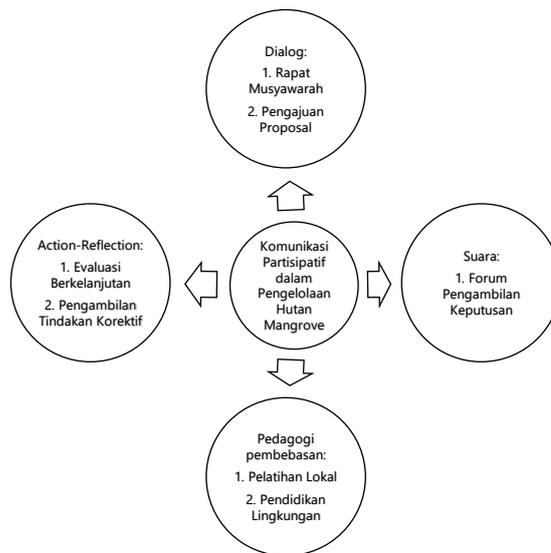
Pada penelitian di Desa Jangkang, ditemukan bahwa komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat Suku Akit berlangsung melalui berbagai forum, termasuk musyawarah desa dan pengajuan usulan. Forum-forum ini menyediakan wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan kepentingan mereka, walaupun terdapat tantangan dalam penerimaan pemerintah terhadap masukan yang diberikan. Menurut Effendy (2011), tujuan komunikasi adalah perubahan sikap, pendapat, dan perilaku, yang mendukung terciptanya lingkungan organisasi yang lebih efektif.

Di Bantan Tengah, evaluasi program yang dilakukan menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan relevansi pelatihan yang diberikan kepada masyarakat Suku Akit. Program pelatihan ini bertujuan untuk membangun kapasitas lokal dalam mengelola hutan mangrove. Namun, pendekatan tersebut perlu lebih disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat adat agar manfaatnya lebih terasa. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian lainnya yang menyarankan pentingnya adaptasi kebijakan dengan konteks lokal.

Di Pambang Baru, penggunaan kotak saran di balai desa menjadi salah satu mekanisme komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa. Kotak saran ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka secara tertulis. Namun, respons pemerintah terhadap saran ini masih menjadi tantangan. Proses birokrasi yang lambat seringkali menghambat implementasi keputusan, sehingga komunikasi partisipatif perlu ditingkatkan untuk mencapai pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efektif.

Temuan ini diperkuat dengan studi di Sumatera Barat, yang menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan hutan mangrove yang inklusif dapat menghasilkan hasil yang lebih berkelanjutan. Di sana, keterlibatan masyarakat

lokal dalam proses pengambilan keputusan terbukti mengurangi konflik dan meningkatkan komitmen terhadap konservasi. Hal ini memberikan pelajaran penting bagi pengelolaan hutan mangrove di desa-desa yang dihuni masyarakat Suku Akit, di mana partisipasi masyarakat harus menjadi fokus utama.



**Fig. 1. Komunikasi Partisipatif dalam Pengelolaan Hutan Mangrove**

Kendala utama yang dihadapi di berbagai lokasi ini meliputi keterbatasan akses informasi dan kurangnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Untuk itu, evaluasi pendekatan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa strategi komunikasi partisipatif perlu disesuaikan agar lebih efektif dalam mendukung tujuan konservasi. Penyesuaian ini perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik masyarakat, sehingga keberlanjutan pengelolaan lingkungan dapat tercapai.

Pendidikan pembebasan menjadi kunci dalam membangun kesadaran ekologis yang lebih mendalam di kalangan masyarakat. Melalui pelatihan yang bukan hanya teknis tetapi juga bernilai pemberdayaan, masyarakat didorong untuk terlibat aktif dalam pelestarian lingkungan. Program pendidikan ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga memberikan rasa tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa pendekatan komunikasi partisipatif yang lebih responsif dan integratif diperlukan untuk mencapai keberlanjutan dalam pengelolaan hutan mangrove. Pemerintah desa perlu memfasilitasi dialog terbuka dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan evaluasi kebijakan. Dengan dialog yang terbuka dan berkelanjutan, kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan diterima oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat Suku Akit dalam pengelolaan hutan mangrove, tetapi juga menawarkan rekomendasi konkret. Rekomendasi ini mencakup pengembangan forum komunikasi yang lebih efektif, pendidikan yang membebaskan, serta peningkatan kapasitas pemerintah desa untuk merespons kebutuhan lokal. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, diharapkan komunikasi yang lebih harmonis antara pemerintah dan masyarakat dapat dicapai, sehingga tujuan konservasi hutan mangrove menjadi lebih realistis dan berkelanjutan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat Suku Akit dalam pengelolaan hutan mangrove di Desa Jangkang, Bantan Tengah, dan Pambang Baru dilakukan melalui berbagai saluran, baik formal seperti rapat desa dan musyawarah, maupun informal melalui diskusi harian dan media sosial seperti WhatsApp. Mekanisme ini membantu memperkuat dialog partisipatif,

meskipun masih terdapat tantangan dalam mengakomodasi masukan masyarakat secara cepat dan efektif, terutama karena kendala birokrasi dan keterbatasan sumber daya.

Selain itu, mekanisme penyampaian suara masyarakat yang bervariasi—meliputi musyawarah desa, pengajuan tesis tertulis, kotak saran, dan penggunaan media sosial—membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pengambilan keputusan. Namun, masih ditemukan adanya kesenjangan dalam implementasi masukan mereka ke dalam kebijakan desa. Tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya inklusivitas dan tanggapan pemerintah yang belum optimal, yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap saluran komunikasi menjadi terbatas.

Program pelatihan yang telah dijalankan pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat Suku Akit dalam pengelolaan hutan mangrove perlu disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Pendidikan pembebasan yang diterapkan berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat, namun pengintegrasian pengetahuan tradisional dan ilmu modern serta pengurangan kesenjangan antargenerasi perlu terus ditingkatkan. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses evaluasi program, melalui refleksi tindakan dalam pertemuan dan kunjungan lapangan, memperkuat rasa memiliki dan komitmen terhadap keberlanjutan program.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Aswasulsikin. (2017). *Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pendidikan*. Deepublish.
- Djalal, F., & Supriadi, D. (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Adicipta.
- Effendy, O. U. (2011). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Remaja Rosdakarya.
- Fikri, R. (2006). Aplikasi Penginderaan Jauh Untuk Mendeteksi Perubahan Mangrove di Pulau Bengkalis Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau. *Skripsi. Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Riau, Pekanbaru*, 66.
- Freire, P., & Macedo, D. (2005). *Literacy: Reading the Word and the World*. Routledge.
- Hakim, L. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2), 43.
- Kriyantono, R. (2014). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Prenada Media.
- Kustiawan, W., Syahdafi, A., Fadhli, M., Pangestu, S. A., & Ramadhani, Z. (2023). Konsep Informasi Development, Media Development dan Source of Information dalam Komunikasi Pembangunan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 12797–12806.
- Lawang, R. M. Z. (2004). *Kapital Sosial Dalam Perspektif Sosiologik: Suatu Pengantar*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (FISIP UI) Press.
- McPhail, T. L. (2009). Introduction to Development Communication. *Development Communication: Reframing the Role of the Media*, 4, 1–20.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldanna, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd Edition). SAGE Publications.
- Moleong, L. (2010). Metode penelitian. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Muchtar, K. (2016). Penerapan Komunikasi Partisipatif Pada Pembangunan di Indonesia. *Makna: Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa, Dan Budaya*, 1(1), 20–32.
- Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 192–200.
- Rosaliza, M. (2017). Komunitas Suku Asli (Studi Kapital Sosiologi Masyarakat Suku Akit Pesisir di Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Ilmu Budaya*, 14(1), 39–54.
- Rosyida, I., & Nasdian, F. T. (2011). Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder Dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dampaknya Terhadap Komunitas Pedesaan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(1).
- Saam, Z., & Nurhidayah, T. (2019). *Karakteristik Komunitas Akit Dan Pemberdayaan*. Universitas Riau.
- Siahaya, M. E., Salampessy, M. L., Febryano, I. G., Rositah, E., Silamon, R. F., & Ichsan, A. C. (2016). Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Konservasi Hutan Mangrove di Wilayah Tarakan, Kalimantan Utara. *Jurnal Nusa Sylva*, 16(1), 12–17.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Sumaryadi, I. N., Indratmaja, A. B. G. B., & Hutabarat, N. E. (2010). *Sosiologi Pemerintahan: Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Ghalia Indonesia.

- Tanjung, N. S., Sadono, D., & Wibowo, C. T. (2017). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Nagari di Sumatera Barat. *Jurnal Penyuluhan*, 13(1), 14–30.
- Wicaksono, M. A. (2010). *Analisis Tingkat Partisipasi Warga dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Kasus PT Isuzu Astra Motor Indonesia Assy Plant Pondok Ungu)*. IPB (Institut Pertanian Bogor).
- Yasir, Y., Firdaus, M., Awza, R., & Ismandianto, I. (2020). Penyuluhan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Potensi Desa Wisata di Desa Petalongan Kabupaten Indragiri Hulu. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 2, 159–168.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th Ed.)* (SAGE (ed.); 6th Editio). SAGE Publications.